



## Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor

Heny M. A. Hinghar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribuanan Kalabahi

Received: 17 Oktober 2023  
Revised: 22 Oktober 2023  
Accepted: 16 November 2023

### Abstract

*What is meant by village fund accountability is a form of financial accountability carried out by village apparatus in Tribur Village, Abad Selatan District, Alor Regency. Analysis of the Influence of Community Participation on Village Apparatus Competence and Internal Control Systems on Village Fund Management Accountability. This study aims to determine the effect of community participation, village apparatus competence and internal control systems on village fund management accountability. The method in this study uses primary data. The statistical method used in this study is multiple linear regression, while hypothesis testing is carried out using the t test and significant F test. The results of this study indicate that. Participation has an effect on accountability for managing village funds in Tribur Village, Kecamatan Abad Selatan, Alor Regency, which has a positive value with a significant level of 0.000. The competence of village officials has an effect on accountability for managing village funds, namely a positive value with a significant level of 0.049. that is, it has a positive value with a significant level of 0.016. Community participation, competence of village apparatus and internal control systems have a simultaneous effect on accountability for village dsna management in Tribur Kecamatan ABD Selatan Village, Alor Regency, which together have a significant value of 0.000. or 0%*

**Keywords:** *Community Participation, Village Apparatus Competence , Internal control system , Village Fund Management Accountability*

(\*) Corresponding Author: [henyhinghar45@gmail.com](mailto:henyhinghar45@gmail.com)

**How to Cite:** Hinghar, H. (2023). Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 315-330. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10185287>.

## PENDAHULUAN

Manajemen Keuangan adalah Kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendaliandana dan asset yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Pengelolaan keuangan harus di rencanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari, keuangan dalam sebuah perusahaan, menjadi pmdasi yang kuat terbangunya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi hambur aduk dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan.

Menurut peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang djisebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah skesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program, karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan fungsi dan peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa memiliki arti yang strategis.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada shareholders. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel. Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan Keuangan. Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihannya dan tindakannya.

Menurut Bintarto Gotong royong merupakan adat istiadat berupa tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, hubungan kekerabatan, maupun hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Melalui aktivitas gotong royong ini tercipta rasa kebersamaan dan hubungan emosional antar warga, keakraban dan saling mengenal satu sama lain. Mengungkapkan bahwa, "Dalam artian yang sebenarnya gotong royong dilaksanakan oleh sekelompok penduduk di suatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa pamrih atau dengan lain perkataan secara sukarela menolong secara bersama"

Kompetensi Aparatur Desa merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa. Desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi desa ini dapat mencakup pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang hasil

penelitian Puspa & Praseyo (2020), Rismawatidan Aziiz (2019) Kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, dipermudah mengelola dana desa. Teknologi informasi sendiri sudah digunakan tiap sector bisnis maupun pemerintahan guna membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

SPIP (system pengendalian internal pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah system pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengeturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengendalian internal akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan asset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir system pengendalian internal ini adalah untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desa Tribur merupakan salah satu Desa dari ketujuh desa yang berada di Kecamatan Abada Selatan Kabupaten Alor, yang didalam operasional kegiatan kantornya selalu melihat faktor akuntabilitas dan pengelolaan dana desa sebagai faktor yang penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengelolaan dana desa yang ada di desa tribur selalu bertumbuh pada kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik apabila ada partisipasi masyarakat. Aparatur yang berada di desa memiliki kompetensi yang membantu sehingga dapat menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih baik lagi.

Akuntabilitas adalah salah satu faktor penting bagi desa Tribur dalam mengelola dana desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa Tribur melibatkan kemampuan pemerintah desa Tribur untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa Tribur. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang ada di desa Tribur Kecamatan Abad Selatan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting juga untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya keterlibatan partisipasi dari masyarakat.

Selain partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa juga merupakan faktor penting dalam mengelola dana desa. Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut

sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa yang ada di desa Tribur Kecamatan Abad Selatan.

Selain partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal juga merupakan salah satu faktor penting dalam mengelola dana desa. Sistem pengendalian internal yang di desa Tribur merupakan salah satu sistem pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Sistem pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah desa Tribur Kecamatan Abad Selatan. Tujuan sistem pengendalian internal ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, di desa Tribur Kecamatan Abad Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor”**.

## **LANDASAN TEORI**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

#### **1. Pengertian Akuntabilitas Dana Desa**

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihanpilihannya dan tindakannya.

Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018) akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.” Menurut Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.” **Indikator Akuntabilitas**

Menurut Setyaningrum di (2017) indikator akuntabilitas yaitu:

1. Ada proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses public
5. Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil

## **Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Menurut Purwaningsih (2020) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

### **2. Indikator Partisipasi Masyarakat**

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, Meronda (2021) mengatakan bahwa ada empat bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil biasanya seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia.

## **Kompetensi Aparatur**

### **1. Pengertian Kompetensi Aparatur**

“Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya“ (Widyatama, 2017).

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Wibowo (2016).

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

## 2. **Indikator Kompetensi Aparatur**

Menurut Ruky dalam Fadillah, dkk (2017), indicator kompetensi yaitu:

1. Karakter pribadi (traits) adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.
2. Konsep diri (self concept) adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.
3. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu area spesifik tertentu.
4. Keterampilan (skill) adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.
5. Motivasi kerja (motives) adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi atau tujuan.

## **Sistem Pengendalian Internal**

### 1. **Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian sistem pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah sistem informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan computer.

Sistem pengendalian internal dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (vertikal).

### 2. **Indikator Sistem Pengendalian Internal**

Komponen-komponen Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2016) adalah:

1. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan.
2. Penaksiran risiko adalah proses dinamis dan berulang (iteratif) untuk mengenali (identifikasi) dan menilai (analisis) risiko atas pencapaian tujuan. Risiko yang

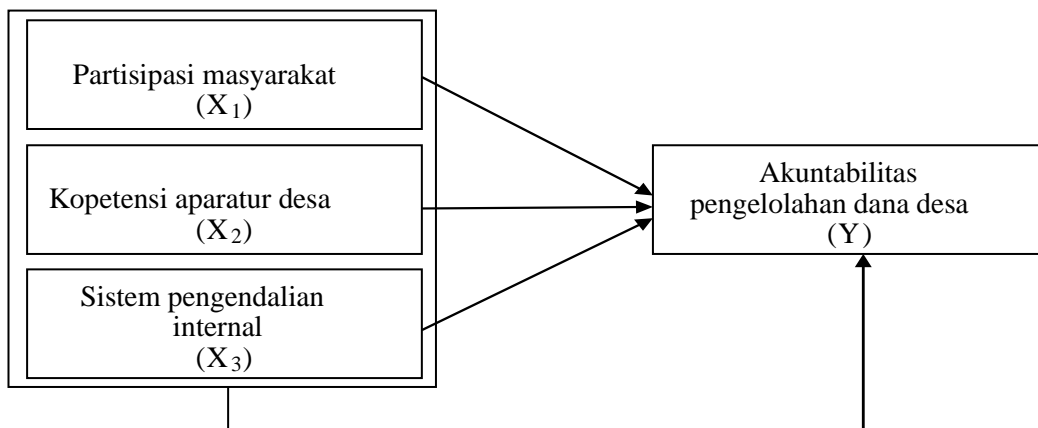
teridentifikasi selanjutnya dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan

3. Aktivitas Pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur (misalnya prosedur operasi standar atau SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.
4. Informasi dan komunikasi entitas memerlukan informasi dan komunikasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.
5. Pemantauan entitas memerlukan informasi demi terselenggaranya tanggung jawab pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel penelitian adalah Kepala Desa 1 Orang, Sekretaris 1 Orang, Kaur Pemerintah 1 Orang, Kaur Pembangunan 1 Orang, Kaur Keuangan 1 Orang, Kaur Umum 1 Orang, BPD 6 Orang, Dusun 3 Orang, RW 6 orang RT 12 Orang, Perwakilan Masyarakat 7 Orang. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni menentukan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimaksudkan didalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi. Artinya sampel adalah bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang,

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan dua tahapan analisis yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis pendahuluan terdiri dari statistik deskriptif, uji kuesioner, dan uji asumsi klasik. Analisis lanjutan terdiri atas analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F.



Keterangan:

- : Pengaruh secara parsial
- ↳ : Pengaruh secara simultan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Kosiner

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menggunakan sah atau tidaknya suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk membandingkan nilai  $r$  hitung untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation* dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df = n - k$ ), dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah item. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,30$ . Maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali 2018).

Dimana:

$r_{xy}$  = koefisien k

$\sum x$  = skor variabel independen

$\sum y$  = skor variabel dependen

$\sum xy$  = hasil kali skor butir dengan skor totalpenden

$n$  = jumlah responden

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis digunakan program SPSS 25 for windows.

#### a. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)

Berikut ini disajikan ringkasan perhitungan validitas dan dapat dilihat pada tabel 4.9 Sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (X1)**

Item soal	Pearson correlation r Hitung	Syarat	Keterangan
P1	0,594	0,3	Valid
P2	0,411	0,3	Valid
P3	0,640	0,3	Valid
P4	0,595	0,3	Valid
P5	0,669	0,3	Valid

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan hasil uji validitas variable Partisipasi Masyarakat terlihat dalam tabel 4.9 di atas diketahui nilai  $r_{\text{hitung}}$  untuk semua item pernyataan lebih besar dari  $>0.3$  dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada koisoner dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X2)

Berikut ini disajikan ringkasan perhitungan validitas dan dapat dilihat pada tabel 4.10 Sebagai berikut :

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa (X<sub>2</sub>)**

Item soal	Pearson correlation r Hitung	Syarat	Keterangan
P1	0,430	0,3	Valid
P2	0,316	0,3	Valid
P3	0,372	0,3	Valid
P4	0,383	0,3	Valid
P5	0,511	0,3	Valid

*Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023*

Berdasarkan hasil uji validitas variable Partisipasi Masyarakat terlihat dalam tabel 4.10 di atas diketahui nilai  $r_{\text{hitung}}$  untuk semua item pernyataan lebih besar atau samadengan dari  $\geq 0.3$  dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada koisoner dinyatakan valid.

c. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)

Berikut ini disajikan ringkasan perhitungan validitas dan dapat dilihat pada tabel 4.11 Sebagai berikut

**Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal**

Item soal	Pearson correlation r Hitung	Syarat	Keterangan
P1	0,300	0,3	Valid
P2	0,528	0,3	Valid
P3	0,343	0,3	Valid
P4	0,401	0,3	Valid
P5	0,423	0,3	Valid

*Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023*

Berdasarkan hasil uji validitas variable Partisipasi Masyarakat terlihat dalam tabel 4.11 di atas diketahui nilai  $r_{\text{hitung}}$  untuk semua item pernyataan lebih besar atau samadengan dari  $\geq 0.3$  dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada koisoner dinyatakan valid.

d. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berikut ini disajikan ringkasan perhitungan validitas dan dapat dilihat pada tabel 4.12 Sebagai berikut

**Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Item soal	Pearson correlation r Hitung	Syarat	Keterangan
P1	0,529	0,3	Valid
P2	0,371	0,3	Valid
P3	0,531	0,3	Valid
P4	0,389	0,3	Valid

P5	0,841	0,3	Valid
----	-------	-----	-------

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan hasil uji validitas variable Partisipasi Masyarakat terlihat dalam tabel 4.9 diatas diketahui nilai  $r_{hitung}$  untuk semua item pernyataan lebih besar atau samadengan dari  $\geq 0.3$  dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada koisoner dinyatakan valid.

**2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali 2018). Suatu instrument dikatakan reliable jika nilai  $\alpha > 0.06$ .

1. Jika nilai Alpha cronbach lebih dari atau sama dengan 0,6 ( Alpha crnbach  $> 0,6$ ) maka reliabel
2. Jika nilai Alpha cronbach lebih kecil dari atau 0,6 ( Alpha crnbach  $<0,6$ ) maka tidak reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	r Hitung	Syarat	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	70,00	0,6	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa	69,85	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	69,45	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	69,70	0,6	Reliabel

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan tabel 4.13 tersebut diatas, diketahui bahwa nilai Cronbach alpha setiap variable yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,6, maka dengan demikian hasil yang didapat dalam perhitungan ini semua variable memiliki nilai diatas dari Cronbach alpha.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis legresi berganda. Berikut hasil uji asumsi klasik dari variable penelitian ini.

**1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji kolmogrow smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas**

		Unstantdardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,68053248
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,068
	Nagative	-,90

Test Statistic		,90
Asymp. Sig. ( 2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas diketahui nilai probabilitas atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 karna nilai probabilitas ,yakni 0,200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikan, yakni 0,05 Hal ini berarti data berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas ( independen ) Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Ketentuan dalam uji Multikolinearitas.

1. Jika nilai Tolerance  $\geq 0,10$  dan VIF  $\leq 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat Multikolinearitas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai Tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan Multikolinearitas pada penelitian tersebut.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,240	1,879		1,192	,241		
JMLX1	,457	,110	,502	4,159	,000	,407	2,454
JMLX2	,193	,095	,221	2,037	,049	,505	1,981
JMLX3	,259	,103	,273	2,517	,016	,506	1,975

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada intraksi variable Partisipasi Masyarakat, variable Kompetensi Aparatur Desa dan variable Sistem Pengendalian Internal serta variable dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa karna masing-masing nilai tolerance berada diatas 0,10 dan juga nilai VIF yang berada dibawah 10.

3. Hasil Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu observasi yang lain. Apabila varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain tetap disebut homokedasitas. Sedangkan apabila varians dari residual suatu observasi ke observasi lain berbeda maka disebut heterokedasitas. Pada penelitian ini, uji heterokedasitas dilakukan dengan Uji Glejser dimana dapat dilihat apakah dalam model terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria yang digunakan menurut Ghozali, (2016 ) adalah apabila nilai p-value,  $\leq 0,05$ . Maka model tersebut terdapat Heterokedastisitas Namun jika p-value  $\geq 0,05$  maka tidak terdapat Heterokedastisitas

**Tabel 4.15 Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,834	1,208	,690	,495
	JMLX1	-,068	,071	-,960	,344
	JMLX2	-,079	,061	,295	,204
	JMLX3	-,025	,066	-,381	,706

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan table diatas dapat dilihat nilai signifikan masing-masing variabel independen adalah 0,344 untuk Partisipasi Masyarakat ( $x_1$ ), 0,204 untuk Kompetensi Aparatur Desa ( $x_2$ ) dan 0,706 Sistem pengendalian internal ( $x_3$ ) dari ketiga variabel yang diteliti semua variabel bebas dari gejala heteroskedastisitas karna nilai signifikan lebih besar dari alfa.

### 3. Hasil Uji Linearitas

Untuk menguji apakah ada pengaruh variable bebas yaitu Partisipasi Masyarakat ( $x_1$ ), Kompetensi Aparatur Desa ( $x_2$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $x_3$ ), serta variable terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Linearitas**

Variabel	Sig Devation Form Linearity	Syarat	Keterangan
Y*X1	1,932	0,5	Linear
Y*X2	0,163	0,5	Linear
Y*X3	4,022	0,5	Linear

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan hasil uji lineritas pada tabel 4.17 diatas diketahui nilai Sig.Devation From Linearity dari variable bebas  $\geq 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variable bebas yaitu Partisipasi Masyarakat ( $x_1$ ) Kompetensi Aparatur Desa ( $x_2$ ), Sisten Pengendalian Internal ( $x_3$ ) dengan variable terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### Analisis Lanjutan

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada tahap ini teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui gambaran mengenai variable bebas yaitu Partisipasi Masyarakat ( $x_1$ ) Kompetensi Aparatur Desa ( $x_2$ ), Sisten Pengendalian Internal ( $x_3$ ) dengan variable terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tebel 4.18 Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,240	1,879		1,192	,241
	JMLX1	,457	,110	,502	4,159	,000
	JMLX2	,193	,095	,221	2,037	,049
	JMLX3	,259	,103	,273	2,517	,016

Sumber : data diolah SPSS For Windos 2023

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$Y = 2,240 + 0,457 (X1) + 0,193 (X2) + 0,259 (X3) + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Constanta 2,240 mengandung arti bahwa, jika semua variable bebas yakni Partisipasi Masyarakat ( $x_1$ ) Kompetensi Aparatur Desa ( $x_2$ ), Sistem Pengendalian Internal ( $x_3$ ) bernilai costan atau tetap, maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor nilai koefisien regresi variable sebesar 2,240.
2. Partisipasi Masyarakat bernilai positif 0,457 yang berarti bahwa jika Variabel Partisipasi Masyarakat meningkat sebesar satu satuan maka nilai variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor sebesar 0,457 ( 45,7% ) .
3. Kompetensi Aparatur Desa bernilai positif 0,193 yang berarti bahwa jika variable kompetensi aparatur desa meningkat sebesar satusatuan maka nilai variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor sebesar 0,193 ( 19,3 % )
4. Sistem Pengendalian Internal bernilai positif 0,259 yang berarti bahwa jika variabel Sistem Pengendalian Internal meningkat sebesar satusatuan maka nilai variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor sebesar 0,259 ( 25,9 % )

### Uji Hipotesis

#### 1. Hasil Uji Parsial ( Uji t )

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh variable dependen terhadap independen secara individu atau sendiri-sendiri. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan namun apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria menurut Ghazali. (2016) sebagai berikut

- Jika nilai signifikan lebih besar dari pada alfa 0,05 (  $\text{sig} > \alpha$  ), maka  $H_a$  ditolak dan sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari/sama dengan alfa, maka  $H_a$  diterima

**Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,240	1,879		1,192	,241
	X1 Partisipasi Masyarakat	,457	,110	,502	4,159	,000
	X2 Kompetensi Aparatur Desa	,193	,095	,221	2,037	,049
	X3 Sistem Pengendalian Internal	,259	,103	,273	2,517	,016

Sumber : Hasil Olahan SPSS For Windows 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4.19 diatas, maka diketahui :

#### 1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian ini dimaksud untuk menguji pengaruh variable Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor.

Berdasarkan tabel data 4.19 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variable Partisipasi Masyarakat sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,05) sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor

#### 2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variable Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor.

Berdasarkan tabel data 4.19 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variable Kompetensi Aparatur Desa sebesar 0,049 nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,5) sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor

#### 3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variable Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor.

Berdasarkan tabel data 4.19 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variable Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,016 nilai ini lebih kecil dari nilai alfa (0,5) sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### 2. Uji Simultan ( Uji F)

Uji simultan atau uji F ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yakni untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variable bebas yang digunakan dalam Penelitian ini yakni Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap variable terikat yakni

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor dengan langka-langka pengujian sebagai berikut

**Tabel 4.20 Hasil Uji Simultan ( Uji F )**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66,338	3	22,113	44,074	,000 <sup>b</sup>
	Residual	18,062	36	,502		
	Total	84,400	39			

*Sumber : Hasil Olahan SPSS For Windows 2023*

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  ini berarti bahwa penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan variable independen yakni Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tribur Kec Abad Selatan Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor yakni bernilai positif dengan tingkat signifikan 0,000.
2. Secara parsial kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni bernilai positif dengan tingkat signifikan 0,049.
3. Secara parsial sistem pengendalian internal desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni bernilai positif dengan tingkat signifikan 0,016.
4. Secara simultan partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tribur Kecamatan ABAD Selatan Kabupaten Alor yakni bersama-sama memiliki nilai signifikan 0,000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I.G.P.2022 *Pengaruh kompetensi prangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikecamatan sideman kabupaten Karangasem.hita akuntansi dan keuangan*,3(3),48-61
- Benjamin,S.A Taroreh, F.J.,& Poluan,M.C.(2021) *pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa,partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada sekecamatan menganitu di kabupaten kepulauan sanghine) (Doktoral dissertation ,unifersitas katolik de la sella*

- Fajri, R., & Julita, J (2021). *Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, Kompetensi aparatur desa, dan [emahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal al Iqtishad, 202117: 209-227*
- Firdaus, F., Yufrinalis, M., Fil, S., Putri, R., Supriyanto, S. A. B., Peny, T. L., ... & Ardi Afrizal, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Huda F.M. (2022). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan SPI dengan TI terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Doktoral di sertation, UPN Veteran Jawa Timor*.
- Nainggolan, G A., Sembiring, G Luis (2023) *partisipasi masyarakat desa perdamaiian kecamatan tanjung morawa kabupaten deli serdang dalam pemilu Multiscience, 1(1), 25-30S*
- Pengeturanp Pemerintah No.60. 2008 *tentang sistem pengendalian internal pemerintah*.
- Peny, T. (2022). Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2127-2142. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.812>
- Peraturan Menteri Desa No 4. 2015. *Dana Desa. Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 20.2018. *pengelolaan keuangan desa. Republik Indonesia*.
- Wahyati, F.N (2020) *pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi impris pada desa e-kecamatan muntilan) (Doctoral dissertation, skripsi, universitas muhammadiyah magelang)*.